

PANCASILA DAN KEBANGSAAN DALAM MASYARAKAT MAJE- MUK DENGAN KEANEKARA- GAMAN KEBUDAYAAN

S. Budhisantosa*)

Kebanyakan negara yang baru merdeka sejak perang dunia yang lalu menghadapi masalah yang berkepanjangan dalam memperjuangkan pengakuan kesetaraan dalam pergaulan internasional (equality) sebagai bangsa berdaulat. Di samping hambatan yang ditimbulkan oleh sementara negara kolonial yang ingin mempertahankan pengaruhnya, kebanyakan negara yang baru merdeka itu menghadapi masalah dalam negeri yang tidak kalah beratnya. Oleh karena itu mereka harus berjuang untuk membebaskan diri dari sisa-sisa pengaruh kekuasaan kolonial, memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan warganya, di samping membangun administrasi pemerintahan yang efektif dan mengembangkan kebudayaan nasional.

Pembebasan dari Sisa Pengaruh Kekuasaan Kolonial

Sesungguhnya perjuangan untuk membebaskan diri dari sisa-sisa pengaruh kekuasaan kolonial (*total independence*) itu tidak kalah beratnya dengan perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Dalam kenyataan, tidak mudah bagi bangsa yang baru merdeka itu mengganti seluruh peraturan dan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah kolonial untuk me-

mecah belah masyarakat jajahan dalam upayanya mempertahankan kekuasaan. Tidak kalah sulitnya adalah mengubah sikap mental dan pola pribumi atau *inlander* yang tertanam akibat tekanan atau pemasangan kedaulatan mereka selama penjajahan. Tidak urung sikap mental dan pola pikir jajahan itu (*colonial mentality*) sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sekalipun

*) Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia

telah terbebas dari berbagai bentuk penindasan oleh bangsa lain.

Masalah dalam negeri yang tidak kalah beratnya adalah membangun satu bangsa (*national integration*) dengan mempersatukan segenap penduduk di bekas daerah jajahan yang semula mempunyai aneka ragam latar belakang sosial dan kebudayaan. Dalam kenyataan banyak di antara bangsa-bangsa yang baru merdeka itu lahir sebagai hasil kesepakatan untuk memperjuangkan kemerdekaan bersama dari sejumlah banyak masyarakat yang semula hidup dalam kelompok-kelompok sosial yang mandiri. Ketika perjuangan kemerdekaan telah berakhir dengan kemenangan, biasanya timbul masalah baru dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih besar dan kompleks perwujudannya.

Sementara itu tuntutan masyarakat untuk segera meningkatkan kesejahteraan umum tidak dapat ditunda-tunda lagi (*economic development*). Hal ini menambah beban pemerintah baru yang selain menghadapi kekurangan personil, lemahnya administrasi pemerintahan dan keterbatasan sarana serta prasarana yang diperlukan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, justru seringkali menjadi penghamb

at usaha untuk membebaskan diri dari sisa pengaruh kekuasaan asing dan menambah berat ketergantungan terhadap bantuan pihak asing.

Integrasi Nasional

Sesungguhnya bangsa Indonesia, sebagaimana halnya dengan negara-negara lain yang baru merdeka, tidak bebas dari tuntutan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dalam pergaulan internasional. Pengakuan kesetaraan itu, menurut R. Harris (1968), harus diperjuangkan dengan membebaskan diri dari sisa-sisa pengaruh kekuasaan asing (*total independence*), menegakkan administrasi pemerintahan yang efektif serta membangun kebudayaan nasional sebagai lambang kemampuan bangsa untuk mengatur rumah tangganya. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan itu tidak ringan dan memerlukan banyak pengorbanan jiwa raga, hartabenda, waktu dan pemikiran yang dapat mengubah tatanan sosial maupun perangkat nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Oleh karenanya, Harris memberi predikat pada perjuangan kesetaraan itu sebagai revolusi (*revolution of equality*).

Usaha mempersatukan se-

genap penduduk di bekas daerah jajahan Hindia Belanda menjadi satu bangsa yang merdeka itu tidaklah mudah. Untuk membebaskan diri dari sisa-sisa pengaruh kekuasaan kolonial, biasanya harus dilakukan dengan menghadapi kekuatan asing yang masih ingin mempertahankan pengaruhnya, di samping menghadapi kekuatan konservatif dari dalam negeri. Pada umumnya bekas penguasa kolonial itu tidak sepenuhnya rela untuk melepaskan daerah jajahannya secara penuh. Setidaknya-tidaknya mereka berharap bahwa negara-negara yang baru merdeka itu dapat dikuasai secara tidak langsung, melalui berbagai cara, seperti bentuk kerjasama pendidikan dan kebudayaan, bantuan teknik maupun dana pembangunan. Dengan demikian akan mempermudah intervensi untuk mempertahankan pengaruh dan mengambil keuntungan sosial-budaya, politik maupun ekonomi.

Pembentukan berbagai negara "boneka" di lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia, mencerminkan betapa sesungguhnya Belanda ingin mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Kalaupun tidak berhasil, negara kolonial itu biasanya membentuk persekutuan persema-kmuran, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Inggris ter-

hadap negara-negara bekas jajahannya. Bahkan tidak kurang akal, mereka berusaha membangun pasaran bersama, ataupun lembaga keuangan yang siap mengucurkan dana bantuan kepada negara yang baru merdeka untuk mempermudah intervensi ekonomi yang dapat membuka jalan ke arah intervensi politik dan keamanan melalui mitra-mitra lokal (*local counterpart*) yang dapat diajak berkolaborasi.

Mengingat kenyataan tersebut, tidaklah berlebihan kalau perjuangan untuk membebaskan diri dari sisa-sisa pengaruh kolonial itu tidak kalah beratnya dengan perjuangan memenangkan kemerdekaan yang dilalui dengan menggunakan kekerasan bersenjata. Pembasmian sisa-sisa pengaruh kekuasaan asing yang tidak kalah sulitnya adalah mengubah mentalitas sementara warga masyarakat. Sisa-sisa pengaruh kekuasaan kolonial itu biasanya tertanam kuat pada sementara warga masyarakat, terutama mereka yang dihinggapi mentalitas aparat kolonial (*colonial administrator mentality*) yang cenderung menganggap rakyatnya bodoh, malas dan terbelakang. Tidak kalah banyaknya adalah mereka yang dihinggapi mentalitas pribumi yang merasa rendah diri dan senantiasa menghargai lebih tinggi kebu-

dayaan penguasa kolonial yang berlanjut dengan pemujaan terhadap apa pun yang datang dari luar. Reaksi yang berlebihan terhadap dominannya pengaruh dari luar itu seringkali muncul dalam bentuk mengkambinghitamkan pengaruh asing sebagai biang keladi atau momok yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Karena itu, tanpa seleksi, masyarakat cenderung menolak segala unsur pembaharuan karena potensinya untuk merusak kemapapan. Menghadapi kenyataan sosial yang kurang menguntungkan itu, pemerintahan Orde Lama menjadi sibuk untuk membangun bangsa dengan menitikberatkan pembangunan karakter bangsa daripada pembangunan fisik dan ekonomi.

Tidak kalah pentingnya dalam perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan, adalah pembangunan sistem administrasi pemerintahan yang mencerminkan kemampuan bangsa untuk mengatur rumah-tangganya secara tertib dan efektif. Dalam kenyataan, selain kendala keterbatasan sumberdaya manusia yang mempunyai ketrampilan dan keahlian yang diperlukan, tidak kalah beratnya hambatan yang dihadapi adalah sistem sosial dan kebudayaan yang kurang mendukung. Pada

umumnya masyarakat Indonesia masih kuat terikat oleh tradisi masyarakat agraris yang bertumpu pada ekonomi subsistensi. Walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia dewasa ini telah hidup di perkotaan, namun pola-pola hubungan antarindividu masih mendominasi pola pikir dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula, walaupun organisasi sosial yang berkembang untuk mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara telah melintasi batas-batas lingkungan kekerabatan maupun kedaerahan, namun dominasi pola-pola interaksi sosial antarindividu dan organisasi sosial dalam lingkup keluarga masih kuat. Nilai-nilai budaya yang membenarkan hubungan sosial secara impersonal maupun perluasan organisasi ke luar lingkungan kerabat (*extra family organization*), perlu dikembangkan dengan dukungan pranata sosial dan nilai-nilai budaya terkait. Oleh karena itu tidaklah berlebihan kalau para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Sementara itu pengembangan kebudayaan nasional sebagai bukti kemampuan bangsa untuk membangun dirinya, seringkali terlantar kalau tidak dikatakan

sama sekali diabaikan. Dalam perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dalam pergaulan antarbangsa. Sesungguhnya, sebagaimana dikatakan oleh Mckim Marriott (19..): "Tidak satu negara pun, sebagaimana halnya dengan anak-anak, yang mau tampil di panggung dunia dengan kerangka politik yang telanjang". Karena itu setiap negara akan berusaha tampil dengan kelengkapan budayanya sebagai jati diri yang membedakan dengan negara lainnya. Karena itu pembangunan kebudayaan nasional tidak boleh diabaikan dalam perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan di kalangan internasional. Tuntutan pembangunan kebudayaan nasional tidak semata-mata terdorong oleh kebutuhan akan media sosial yang dapat mempersatukan bangsa, melainkan juga karena kebutuhan akan jatidiri yang membedakan dari bangsa lain.

Kenyataan tersebut sebenarnya telah disadari oleh para pelopor kemerdekaan sejak awal kebangkitan bangsa. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada Kongres Pemuda ke-2 pada tanggal 28 Oktober 1928 mengukuhkan kesadaran penduduk di kepulauan Nusantara untuk membangun kebudayaan bangsa sebagaimana tercermin dalam kalimat ke-3 yang antara lain

menyatakan "...menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia" dalam kongres pemuda ke-2 (28 Oktober 1928). Penerimaan bahasa persatuan sebagai lambang kebudayaan nasional itu kemudian dikukuhkan dalam UUD 1945, khususnya pasal 32 dan penjelasannya.

Walaupun tekad penduduk di kepulauan Nusantara itu telah tumbuh sejak kebangkitan kebangsaan yang ditengarai dengan berdirinya perkumpulan seni-budaya (1908) dan disusul dengan Sumpah Pemuda, namun untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk dengan keanekaragaman kebudayaannya itu tidaklah mudah. Betapa beratnya perjuangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia itu tercermin dalam predikat yang diberikan oleh C. Geertz (1965) sebagai revolusi (*Integrative Revolution*). Karena itu pula, pemerintahan Orde Lama menghabiskan 25 tahun pertama sejak kemerdekaan untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa.

Kendala utama dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu, terutama disebabkan oleh kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemajemukan masyarakat dan keane-

karagaman kebudayaan itu bukan hanya mencerminkan perwujudan pola-pola adaptasi yang dikembangkan oleh masyarakat yang tersebar di kepulauan Nusantara yang amat luas, melainkan juga karena pengalaman sejarah yang berbeda. Ada sementara kelompok sosial yang bermukim di kawasan yang mudah dijangkau oleh pendatang yang memperkenalkan kebudayaan yang mereka bawa serta. Sebaliknya tidak sedikit kelompok sosial yang tinggal di pedalaman yang jauh dari jangkauan lintasan perdagangan dan perhubungan. Akibatnya kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan itu tidak hanya bersifat mendatar (horizontal), melainkan juga mencerminkan kesenjangan perkembangan yang vertikal.

Kemajemukan Masyarakat

Sesungguhnya setiap orang dapat berganti nama, agama ataupun pasangan hidupnya setiap waktu apabila diperlukan. Akan tetapi orang tidak dapat bertukar kakek ataupun neneknya sesuka hati (baca Milton, 19..). Hal itu sesuai dengan kenyataan bahwa seseorang bisa tidak mempunyai bapak, akan tetapi ia pasti mempunyai ibu yang melahirkannya. Oleh karena itu, setiap insan pasti mem-

punyai kelompok sosial asal-usulnya, tanpa kecuali. Setidaknya ia pasti mempunyai keluarga yang merawat dan membesarkannya. Oleh karena itu manusia tergolong sebagai makhluk sosial (*social being*) yang tidak mungkin hidup seorang diri. Di mana pun dan bilamana pun manusia hidup, pasti mengembangkan kelompok sosial sebagai wadah kerjasama untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan bersama.

Ada sementara pendapat bahwa kesatuan sosial terkecil dan terpenting yang dikembangkan manusia itu adalah keluarga batin (*nuclear family*) yang terdiri dari seorang lelaki yang bertindak sebagai suami-ayah dalam keluarga dan seorang wanita atau lebih yang bertindak sebagai isteri (-isteri)-ibu rumah tangga. Dalam keluarga itulah dikembangkan keturunan sebagai generasi penerus yang memerlukan perawatan dan pendidikan sebelum mereka dapat membentuk keluarga dan mendirikan rumahtangga secara mandiri.

Terlepas dari setuju atau tidak dengan pendapat tersebut, dalam kenyataan banyak ragam bentuk keluarga yang dikembangkan manusia sebagai wadah kerjasama dan beradaptasi terhadap lingkungannya secara

aktif. Kehadiran keluarga sebagai wadah kerjasama dan mempersiapkan keturunan secara sah (*family of procreation*) tidak dapat diabaikan fungsi sosialnya. Sementara itu kaitan seseorang dengan kerabat yang lebih luas dari lingkungan keluarga batih (*family of orientation*) tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu ada pendapat bahwa hubungan kekerabatan (*genealogical relation*) merupakan landasan utama dalam pengembangan kelompok sosial yang diperlukan untuk membina kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial.

Akan tetapi sebagai makhluk lingkungan (*territorial being*) setiap kelompok kerabat (*kingroup*) itu tidak dapat lepas dari suatu lingkungan permukiman tertentu. Oleh karena itu pula kesatuan wilayah bermukim menjadi landasan pengembangan organisasi sosial yang tidak kalah pentingnya dari hubungan kekerabatan. Dalam kenyataan kebanyakan komunitas perdesaan terwujud karena kedua landasan pembentukan kelompok sosial, baik landasan genealogik maupun territorial (*genealogic and territorial based community*).

Sejalan dengan perjalanan waktu, kelompok-kelompok sosial itu berkembang dalam jumlah warganya maupun perse-

barannya. Karena besarnya jumlah warga yang tersebar luas di permukaan bumi, seringkali antarsesama warga suatu kelompok kerabat tidak saling mengenal lagi. Tidaklah mengherankan kalau di kalangan masyarakat Batak, misalnya, yang mengembangkan sistem marga dalam pengelompokan kerabat patrilineal, mempunyai kebiasaan untuk saling menanyakan asal-usul marga masing-masing sebelum melanjutkan pembicaraan untuk menentukan sikap dan perlakuan. Hal yang sama terjadi di kalangan masyarakat yang menganut prinsip kekerabatan bilateral, mereka biasanya saling bertanya tentang asal-usul keluarganya (*kindred*).

Tidak dapat disangkal bahwa kelompok-kelompok sosial itu mengembangkan organisasi sosial untuk menata kehidupan bersama secara tertib dan efektif. Tatanan sosial itu dikembangkan dengan mengacu pada kebudayaan yang berfungsi sebagai rujukan bagi pendukungnya untuk memahami lingkungan dan pengalaman, dan berfungsi sebagai motor bagi kehidupan bermasyarakat. Organisasi sosial dan perangkat nilai yang mempengaruhi kehidupan suatu masyarakat itu, secara populer, dinamakan adat-istiadat ataupun kebudayaan dalam arti luas. Oleh karena itu setiap kelompok

sosial pasti mengembangkan kebudayaan sebagai kerangka acuan dalam menyelenggarakan kehidupan bersama. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa bentuk suatu masyarakat merupakan cermin kebudayaan yang didukungnya. Kesadaran seseorang akan kelompok sosialnya akan semakin kuat apabila ia terlibat dalam interaksi sosial dengan orang dari kelompok sosial yang berlainan.

Sukubangsa dan Kesukubangsaan

Macam-macam kelompok sosial yang dikembangkan manusia, sesuai dengan pemahaman dan penilaian mereka terhadap lingkungannya dalam arti luas. Ada masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial yang terdiri dari sejumlah kecil warga yang terikat oleh hubungan kekerabatan unilineal, seperti kelompok pemburu (*band*) yang memerlukan mobilitas yang tinggi. Ada pula yang telah mengembangkan persekutuan sosial yang lebih luas seperti *horde* yang terdiri dari sejumlah kelompok pemburu dan peramu, untuk keperluan pengaman wilayah perburuan bersama. Sebaliknya ada pula yang berbentuk *lineage* atau kumpulan keluarga luas terbatas yang unilineal dan sudah menetap di perkam-

pungan yang berdekatan dengan sumber makanan mereka. Sejumlah keluarga luas terbatas yang unilineal dan tersebar luas di suatu kawasan bersama, biasanya membentuk satu klen (*clan*) dan keseluruhan klen yang merasa berasal dari satu nenek moyang bersama, baik secara nyata (*real*) maupun fiktif, membentuk satu suku (*tribe*).

Berdasarkan pada logika tersebut, timbul anggapan bahwa sukubangsa (*ethnic group*) itu adalah sekumpulan manusia (*population*) yang ditandai dengan: Pertama, berkembang biak dalam kelompoknya yang eksklusif (*biologically self perpetuating*); Kedua, mendukung seperangkat nilai-nilai fundamental yang tercermin dalam kesatuan kebudayaan yang nyata; Ketiga, menciptakan arena komunikasi interaksi sosial yang intensif; Keempat, mempunyai keanggotaan berdasarkan pengakuan diri dan pengakuan pihak ketiga.

Pengertian suku bangsa yang antara lain dipergunakan oleh Naroll (1964) dan Kuntjaraningrat (19..) dan Budhisantosa (19..) itu tidak berbeda dengan pengertian kesatuan ras, kebudayaan dan bahasa ataupun kelompok sosial yang berbeda dengan kelompok sosial lainnya (Barth, 1969). Pengertian suku bangsa sedemikian itu lebih menekankan pada asal-usul, struktur dan

fungsi suatu kelompok sosial daripada kenyataan dalam kehidupan masyarakat manusia yang dinamis. Sebagai contoh dapat dikemukakan pola pikir yang melatarbelakangi penyusunan ensiklopedi suku-sukubangsa di Indonesia yang ditulis oleh Zulyani (19..) dan Melalatoa (19..). Kedua karya sarjana Indonesia yang amat berharga sebagai rekaman itu sesungguhnya berpangkal tolak dari proyek pemetaan persebaran suku bangsa yang dilakukan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebelum masa pemerintahan reformasi. Sebagai hasil sampingan yang mendahului induknya, kedua buku itu lebih tepat dinamakan ensiklopedi kebudayaan Indonesia yang merekam anekaragam kebudayaan-kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah. Dari rekaman itu, tanpa disengaja, tercatat pula kesadaran masyarakat akan kemajemukan yang ditandai dengan kebudayaan yang diyakini sebagai salah satu unsur pembeda walaupun dalam kenyataan tidak selalu benar.

Uraian tersebut sekedar untuk memberikan gambaran betapa besar pengaruh pemikiran yang menyamakan suku bangsa dengan kesatuan bahasa, kebu-

dayaan dan ras, sehingga menghambat upaya pemahaman tentang kehidupan sosial dalam masyarakat majemuk dengan anekaragam latar belakang kebudayaannya. Seolah-olah setiap suku (*tribe*) atau sukubangsa (*ethnic group*) itu hidup dalam keterasingan dan berusaha melestarikan kebudayaan masing-masing tanpa menghiraukan kehidupan masyarakat di sekitarnya yang biasanya dianggap lebih rendah. Dalam kenyataan justru kesadaran dan makna suku bangsa (*ethnicity*) itu baru muncul ketika seseorang terlibat dalam interaksi dengan warga masyarakat yang mempunyai latar belakang kesukubangsaan yang berbeda (Weinreich dan Mathias, 19..).

Secara lebih tegas, Schermerhorn (1970) menyatakan bahwa sukubangsa adalah suatu kolektif, dalam masyarakat yang lebih luas, yang merasa diri mereka berasal dari satu nenek moyang bersama yang pernah hidup (*real*) maupun yang hanya ada dalam keyakinan ataupun kenangan sejarah. Seringkali mereka juga memiliki simbol-simbol kebudayaan tertentu yang digunakan sebagai identitas kelompok serta menjadi pengikat kesetiakawanan warganya, seperti bahasa, adat-istiadat, makanan, pakaian maupun keyakinan agama. Dengan demikian

jelaslah bahwa pengertian suku-bangsa itu erat kaitannya dengan kemajemukan suatu masyarakat yang meliputinya seperti masyarakat Indonesia dewasa ini. Simbol-simbol kesukubangsaan itu dapat diaktifkan sewaktu-waktu dalam interaksi sosial yang melibatkan individu-individu dari berbagai kelompok suku bangsa yang berbeda.

Identitas Kelompok Sosial (Group Identity)

Sesungguhnya setiap orang memerlukan identitas diri untuk mempermudah menempatkan diri dan memperlakukan lawannya secara efektif dalam pergaulan. Demikian pula setiap orang memerlukan identitas sosial yang mencerminkan kedudukan dan peran-peran sosial (status) yang sepatutnya dilakukan (*role expectation*) untuk memperlancar interaksi secara tertib. Dalam masyarakat majemuk kebutuhan sosial itu bertambah dengan identitas kelompok (*group identity*). Identitas kelompok suku bangsa merupakan salah satu perwujudan akan perlunya identitas kelompok dalam masyarakat majemuk, di samping kelompok pekerja (*professional identity*), kelompok keagamaan dan lain-lain.

Mengenai istilah suku bangsa (*ethnic group*) itu sendiri, sebe-

narnya belum terlalu tua. Sebelum 1972 istilah *ethnic group* itu belum pernah tercantum dalam kamus-kamus berbahasa Inggris, karena memang baru digunakan untuk pertama kalinya oleh Riesman pada tahun 1953 dalam uraiannya tentang perluasan interaksi sosial yang melintasi batas-batas kelompok sosial dalam masyarakat majemuk. Pengelompokan suku bangsa itu akan senantiasa bertahan sebagai kategori sosial (*social category*) yang mempunyai fungsi dalam penataan interaksi sosial antarwarga. Sebagai kategori sosial, keanggotaan seseorang dalam suatu sukubangsa bersifat askriptif atas dasar pengakuan diri yang dikukuhkan oleh pihak ketiga (*ascriptive and self identification*). Dengan demikian mobilitas dan interaksi sosial yang intensif tidak mengganggu batas-batas kesukubangsaan itu sendiri.

Ada anggapan bahwa kesadaran akan sukubangsa dapat menjadi lemah kalau intensitas interaksi sosial dalam suatu masyarakat majemuk meningkat. Karena kesibukan dalam kegiatan sosial masing-masing, orang tidak peduli akan asal-usul dan identitas kesukubangsaan mereka yang terlibat. Karena itu lama-kelamaan, identitas kesukubangsaan dalam masyarakat majemuk itu akan hilang dan berganti dengan identitas baru

yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat. Anggapan itu tidak selalu benar, karena justru dalam interaksi sosial yang melibatkan banyak orang yang berasal dari berbagai kelompok sosial dalam masyarakat majemuk itu orang memerlukan identitas kelompok dalam menempatkan diri dan pihak lain untuk memilih tindakan yang dianggap lebih efektif. Karena itu semakin tinggi intensitas interaksi sosial dalam suatu masyarakat majemuk, semakin kuat kebutuhan akan identitas kelompok. Salah satu identitas kelompok yang paling kuat dan mudah dimanipulasi adalah kesukubangsaan, sebagaimana kini marak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mememperjuangkan kepentingan pribadi, kelompok sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan.

Kesukubangsaan (*Ethnicity*)

Kesadaran akan lambang-lambang kesukubangsaan itu biasanya menguat, apabila masyarakat menghadapi perubahan, seperti: Pertama, identitas kerja (*occupational identity*) tidak efektif lagi sebagai lambang harga diri seseorang; Kedua, tekanan politik dalam negeri; Ketiga, agama kurang efektif sebagai sumber identitas perorangan; Keempat, perubahan sosial dan kebudayaan yang amat pesat;

Kelima, perkembangan masyarakat perkotaan (*mass-society*).

Dalam mengulas masyarakat majemuk Amerika, Glazer dan Moinyhan (1970) menyatakan ketiga alasan pertama sebagai penyebab menguatnya kembali kesukubangsaan. Perkembangan industri yang telah memacu pembagian kerja dan spesialisasi dengan rincinya, sehingga mengaburkan okupasi sebagai identitas yang dapat digunakan sebagai lambang harga diri warganya. Pada masyarakat agraris (*preindustrial society*), pembagian kerja belum sekompleks seperti masyarakat industri, karena itu setiap keahlian menjadi monopoli sekelompok warga yang menikmati kedudukan dan penghormatan sosial tertentu. Pola-pola interaksi sosial yang bersifat antarperorangan itu (*interpersonal relation*) dalam masyarakat pedesaan itu berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat industri yang mengandalkan pada barang yang dihasilkan atau jasa yang dapat dipertukarkan sebagai landasan interaksi sosial (*impersonal relation*). Oleh karena itu identitas pekerjaan menjadi kurang efektif. Dalam keadaan demikian, orang cenderung untuk mengaktifkan kembali lambang-lambang kesukubangsaan sebagai identitas dalam pergaulan lintas kelompok sosial masing-masing.

Kesukubangsaan juga bisa menguat kembali karena tekanan politik dalam negeri yang dapat memancing perselisihan antarkelompok sukubangsa. Penyelenggaraan pembangunan nasional yang kurang mengindahkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Pemberian kemudahan yang berlebihan terhadap sejumlah kecil pengusaha besar demi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan mengorbankan sebagian terbesar penduduk yang kurang beruntung telah mengabaikan rasa keadilan di kalangan masyarakat luas. Sebaliknya mengutamakan bantuan kepada golongan ekonomi lemah dalam rangka program Jaringan Pengaman Sosial telah membangkitkan permusuhan di kalangan mereka yang kurang beruntung terhadap golongan orang kaya. Belum lagi terhitung dampak sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersifat sentralistik. Para elit daerah menghadapi kesulitan untuk mendapatkan peluang mobilitas sosial, ekonomi dan politik tanpa mempunyai jaringan sosial nasional yang dekat dengan pusat kekuasaan. Untuk memenangkan perjuangan, tidak ada lain pilihan bagi elit daerah kecuali mengaktifkan lambang-lambang kesukubangsaan dalam menggalang kekuatan massa penduduknya. Kesemuanya itu dapat

memicu bangkitnya kembali kesukubangsaan dalam memperjuangkan kepentingan perorangan maupun masing-masing kelompok yang merasa telah dikorbankan atau diperlakukan secara tidak adil.

Sementara itu merosotnya agama sebagai simbol kesukubangsaan dalam suatu masyarakat majemuk, juga dapat memperkuat kesadaran akan lambang-lambang kesukubangsaan lainnya sebagai acuan. Pada masa kolonial, agama Kristen Protestan merupakan lambang identitas kaum penguasa, sebagaimana halnya agama-agama Hindu, Budha dan Islam pada masa kejayaan raja-raja di kepulauan Nusantara sebelum kedatangan Belanda. Oleh karena itu, agama pernah menjadi lambang jatidiri sementara penduduk yang efektif. Walaupun dewasa ini ada usaha untuk mengaktifkan lambang-lambang agama sebagai jatidiri ataupun identitas kelompok, namun perbedaan kepentingan yang semakin kompleks dan beragam itu telah mengurangi efektivitas lambang keagamaan sebagai identitas. Hal itu tercermin, antara lain, dalam banyaknya partai politik yang menggunakan lambang-lambang keagamaan dalam pemilihan umum yang baru lalu (1999). Demikian pula pertikaian antarsesama penganut agama,

baik antarsesama kelompok Islam seperti antarorang Madura dan Melayu di Kalimantan Barat maupun antarsesama penganut agama Kristen di Sumatra Utara, mencerminkan rapuhnya agama sebagai sarana untuk memperkuat identitas kelompok sosial.

Di samping ketiga alasan yang dikemukakan oleh Glazer dan Moynihan tersebut, Dashefsky (1975) menambahkan 3 kekuatan lainnya, seperti perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dalam tempo yang relatif singkat dan melanda hampir seluruh sektor kehidupan. Keadaan itu dapat menyebabkan orang kehilangan pedoman dan jatidiri dalam kehidupan bermasyarakat dan karena itu mereka cenderung berusaha menemukan diri dengan mengaktifkan kembali identitas primordial, yaitu kesukubangsaan masing-masing. Hal yang sama berlaku ketika suatu masyarakat berkembang menjadi masyarakat perkotaan (*mass society*) yang terbuka dan semakin besar jumlah anggotanya, sehingga meningkat heterogenitasnya. Dalam kesibukan yang meningkat itulah biasanya orang akan merasakan kesepian (*loneliness*) dalam kesibukan interaksi sosial yang bersifat impersonal. Oleh karena itu orang akan berusaha untuk mencari

kehangatan dan menggalang persahabatan dengan orang-orang yang dapat diandalkan. Biasanya pilihan itu jatuh pada orang-orang yang kebetulan menggunakan simbol-simbol primordial yang sama.

Sementara itu, Dashefsky juga menambahkan betapa sesungguhnya gerakan Kaum Hitam (*Black Movement*) yang diwarnai kesukubangsaan di Amerika Serikat telah menyebar pengaruhnya dan melanda seluruh dunia akhir-akhir ini. Berbagai gerakan sosial, politik dan ekonomi yang menuntut keadilan, demokratisasi politik maupun kebebasan budaya akhir-akhir ini cenderung mengaktifkan simbol-simbol kesukubangsaan untuk menggalang kesetiakawanan sosial dan mengundang simpati dari berbagai pihak dalam perjuangannya. Tidak terkecuali, pengaruh itu sangat besar terasa di Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan sedang mengalami perkembangan yang amat pesat akibat pembangunan yang meningkatkan kegiatan ekonomi tanpa didukung dengan pengembangan nilai budaya dan pranata sosial yang diperlukan.

Akan tetapi, sebagai kategori sosial dalam masyarakat majemuk, pilihan simbol-simbol kesukubangsaan itu telah berkembang dan tidak terikat sepenuhnya

nya pada kebudayaan lama dan asli sebagaimana pengertian orang kebanyakan. Simbol-simbol kesukubangsaan baru dikembangkan, kalau tidak dikatakan direkayasa, untuk membangkitkan sentimen kelompok sosial yang sedang berjuang. Salah satu simbol kesukubangsaan yang dianggap efektif akhir-akhir ini adalah simbol-simbol keagamaan yang dianggap tabu untuk diterima atau ditolak secara kritis. Itulah sebabnya konflik sosial yang melanda masyarakat majemuk Indonesia akhir-akhir ini tidak hanya melibatkan kelompok sukubangsa secara tradisional, melainkan juga antarkategori sosial yang memanipulasi simbol-simbol keagamaan. Dengan mudah "provokator" menggunakan simbol-simbol agama untuk mengerahkan massa guna mendapatkan keuntungan sosial, politik dan ekonomi tanpa memikirkan dampaknya jangka panjang yang sulit dikendalikan.

Sementara itu aparat pemerintahan sipil maupun militer kurang cepat dan tepat dalam menanggapi konflik sosial yang menggunakan lambang-lambang keagamaan. Dalam mengatasi konflik sosial yang berjangkal pada kepentingan sosial, ekonomi dan politik itu, pemerintah lebih mengandalkan pada kemampuan pemuka aga-

ma daripada menangani akar masalah yang menjadi penyebabnya. Akibatnya penyelesaian yang bersifat seremonial itu hanya menghasilkan perdamaian semu yang dicapai secara formal, setiap kali meledak kembali karena akar masalahnya berada di luar lingkup keagamaan. Agama, seringkali dimanipulasi sebagai simbol-simbol untuk membangun kesetiakawanan sosial dan bukan sebagai sebab terjadinya konflik sosial yang harus ditanggulangi.

Akhirnya penanggulangan konflik sosial yang dikategorikan sebagai SARA itu terus berlarut-larut, makan banyak korban harta benda dan jiwa raga penduduk yang tidak berdosa, tanpa kepastian kapan akan berakhir. Kenyataan ini telah ikut memicu perkembangan militerisme yang ditandai dengan pembentukan PAM swakarsa yang pada mulanya digalakkan oleh aparat keamanan yang kewalahan mengatasi kerusuhan sosial. Di samping itu juga muncul berbagai SATGAS pengamanan yang dibentuk oleh berbagai organisasi kemasyarakatan maupun politik, termasuk keagamaan yang menggunakan pakaian seragam dan mempersenjatai diri dengan berbagai kelengkapan perang. Seolah-olah siapa yang menghendaki perdamaian harus siap untuk berperang,

karena kelumpuhan sosial (*social entropy*) yang disebabkan perubahan lingkungan sosial yang melanda Indonesia selama masa pembangunan nasional. Penerapan teknologi maju tanpa kesiapan sosial-budaya, sistem politik dan pemerintahan yang sentralistik, pemasungan kebebasan demi stabilitas pembangunan, telah memicu konflik yang disertai kekerasan (*violent conflict*) dalam masyarakat majemuk yang sedang membangun.

Pembangunan nasional yang mengandalkan penerapan teknologi maju untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan memacu perkembangan sosial-budaya masyarakat Indonesia ternyata justru telah menghancurkan pranata sosial dan menyisihkan nilai-nilai budaya agraris yang selama ini menjadi pedoman bagi masyarakat dalam beradaptasi terhadap lingkungan. Sebaliknya nilai-nilai merkantil, materialistik dan kompetitif yang mengikuti peningkatan kegiatan ekonomi belum dihayati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Persaingan yang tidak seimbang antarmereka yang telah memiliki keunggulan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan dengan sebagian besar penduduk yang masih terikat kuat oleh tradisi agraris itu telah memicu kecemburuan yang disertai dengan ke-

beringasan sosial di berbagai tempat di kepulauan Nusantara.

Gejala sosial yang kurang menguntungkan ini harus segera ditanggulangi dengan memberdayakan masyarakat maupun aparat pemerintahan sipil maupun militer dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut kepastian hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, penataan demokrasi dalam bermasyarakat dan kebebasan budaya untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Kepercayaan diri masyarakat untuk bangkit dan membangun dirinya harus segera diusahakan guna menghindarkan sikap suka mengamuk tanpa kendali akal sehat. Para tokoh masyarakat, pemuka agama dan elit politik harus sadar akan pentingnya perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial, demokrasi dan kebebasan budaya dalam memperjuangkan kepentingan massa yang menitipkan amanah mereka, bukan untuk mengejar popularitas pribadi maupun kelompoknya dengan mengabaikan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat majemuk Indonesia. Kecenderungan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang diperjuangkan oleh para pelopor kebangsaan dan pendiri negara

kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan Kebudayaan Nasional

Kenyataan sosial budaya tersebut sangat dipahami oleh para pelopor kebangsaan dan pendiri negara Republik Indonesia sejak awal, sebagaimana tercermin dalam semangat dan substansi UUD 1945, khususnya pasal 32 yang mengamanatkan "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Masyarakat majemuk itu memerlukan kerangka acuan bersama yang dapat diterima oleh segenap penduduk dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara tertib dan efisien, tanpa menghancurkan kebudayaan-kebudayaan suku bangsa atau daerah yang masih berfungsi sebagai kerangka acuan dalam lingkungan sosial masing-masing kelompoknya. Untuk keperluan itulah kebudayaan nasional dikembangkan sebagai kerangka acuan formal maupun non-formal dalam pergaulan lintas kelompok kesukubangsaan maupun kedaerahan.

Sungguhpun demikian, UUD 1945 juga menyatakan dengan tegas arah pengembangan kebudayaan bangsa antara lain "..... harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-

bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa sendiri dsl." Dengan demikian sudahlah jelas bahwa dalam memajukan kebudayaan nasional, pemerintah tidak boleh mengabaikan dinamika masyarakat dan pengaruh kebudayaan asing dalam pergaulan antarbangsa. Apa yang perlu diperhatikan sebagai tolok ukur adalah bahwa pengembangan kebudayaan nasional itu harus menuju peradaban dengan segala substansinya, seperti nilai-nilai budaya yang menghargai demokrasi, hak asasi manusia dan kesederajatan (*equality*) yang harus diperjuangkan ke dalam maupun ke luar lingkungan masyarakat bangsa sendiri.

Sesungguhnya, sebagaimana diungkapkan oleh MacKim Marriott (19..), tidak satu negara pun - bahkan tidak juga seorang anak - yang mau tampil di dunia tanpa kerangka politik tertentu. Setiap bangsa atau negara senantiasa berhias diri dengan simbol-simbol kebudayaan yang mencerminkan cita-cita maupun keyakinannya yang dianggap luhur. Tidaklah berlebihan kalau semasa jayanya, Bung Karno berusaha menghias ibukota dengan berbagai patung yang mencerminkan rasa keindahan dan kehalusan budi pekerti yang idealnya dihayati oleh segenap war-

ga negaranya. Demikian pula semboyan "*Britania rules the waves*" bukan ungkapan dan pernyataan kosong, melainkan mempunyai kekuatan memerintah (*imperative power*) kepada masyarakat Inggris umumnya. Tidak kalah kuatnya dorongan semangat "*Bushido*", untuk kejayaan bangsa dan negara, orang Jepang rela berkorban sebagai kesatria. Hal yang sama semboyan *Deutsch uber alles* telah mengilhami masyarakat Jerman untuk mengembangkan teknologi modern dan mengejar prestasi sebagai pemimpin dunia.

Kebutuhan akan kebudayaan nasional baik sebagai media sosial, jatidiri bangsa maupun pandangan hidup yang akan menjiwai kehidupan bangsa itu seringkali menyebabkan masyarakat lupa akan keberadaan dan fungsi kebudayaan-kebudayaan Indonesia lainnya yang dihormati dalam UUD 1945. Bahkan ada kecenderungan ekstrim selama masa pembangunan yang mengartikan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika itu tinggal ketunggal-annya semata. Karena itu setiap kali orang berbicara tentang persatuan dan kesatuan bangsa, asosiasinya tertuju pada kesatuan yang monolitik dengan mengabaikan komponen atau unsur-unsur yang mewujudkan persatuan.

Mengingat alasan tersebut,

perlu kiranya dicermati amanat UUD 1945 pasal 32 dan penjelasan tentang kebudayaan nasional dan kebudayaan bangsa. Adapun yang dimaksud dengan kebudayaan bangsa (majemuk), dapat diikuti dalam penjelasannya yang berbunyi: "*Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa dst*"

Amanat UUD 1945 itu seringkali kurang dicermati oleh penyelenggara negara maupun masyarakat luas. Demikian pula dalam pelaksanaan amanat, seringkali kurang memperhatikan rasa keadilan, semangat kerakyatan maupun kebebasan budaya yang tersirat dalam UUD itu sendiri. Bahkan demi keberhasilan pembangunan, kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaannya itu tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Keberadaan kebudayaan yang amat penting artinya bagi para penduduknya sebagai kerangka acuan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari tersisihkan oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Kenyataan tersebut telah

menimbulkan kekecewaan dan bahkan perlawanan sosial di berbagai daerah, terutama sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang membuka peluang bagi masyarakat untuk menyatakan pendapat dan harapan mereka secara leluasa. Gejala perlawanan sosial itu tidak berarti bahwa amanat UUD 1945 tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan kebudayaan nasional dengan segala fungsinya, melainkan karena pelaksanaannya yang kurang memperhatikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan mereka.

Pada mulanya reaksi masyarakat dapat diredam karena besarnya harapan masyarakat terhadap pembangunan nasional yang menjanjikan kemakmuran sebagaimana dicita-citakan bersama dengan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi pengaruh meningkatnya kegiatan ekonomi dunia telah membawa serta nilai-nilai budaya merkantil, materialistik dan kompetitif tanpa diimbangi dengan pengembangan nilai-nilai budaya yang menjamin rasa keadilan (*social justice*), demokrasi (*political democracy*) maupun kebebasan berbudaya (*cultural freedom*).

Tekanan lingkungan yang mengakibatkan keterbatasan sumberdaya dan mutu lingkung-

an hidup (*environmental scarcity*) itu telah memicu penduduk untuk bersaing dalam mendapatkan berbagai peluang hidup yang serba terbatas. Persaingan tanpa jaminan keadilan sosial, penataan demokrasi maupun keleluasaan masyarakat untuk mengembangkan kreativitas budaya mereka itu telah membuka peluang berlakunya hukum rimba. Pertikaian antarindividu dalam memperebutkan sumberdaya maupun peluang mobilitas sosial, ekonomi dan politik, dengan mudah memicu pertikaian antarkelompok yang mengaktifkan simbol-simbol ikatan primordial untuk menggalang massa.

Ketegangan yang menjurus terjadinya pertentangan sosial yang disertai kekerasan dalam memperebutkan sumberdaya dan lingkungan yang sehat pun tidak dapat dihindarkan, tanpa pengembangan kebudayaan nasional sebagai kerangka acuan bersama dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, menanggapi tantangan kemajuan secara dinamis dalam masyarakat majemuk dengan keanekaragaman budayanya. Tanpa pengembangan kebudayaan nasional yang dapat diterima sebagai kerangka acuan bangsa, niscaya persaingan yang tidak sehat itu akan menghantar bangsa kembali pada kehidupan

perkauman atau kesukubangsaan baru (*neo-tribalism*).

Pancasila sebagai Etos Budaya

Berdasarkan kenyataan yang telah diuraikan terdahulu, nyatalah bahwa dalam pembangunan bangsa, orang telah melupakan pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk. Walaupun dalam mempersiapkan pembentukan negara, para pendiri negara telah menyadari akan arti pentingnya kebudayaan sebagai salah satu sarana untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, namun dalam penyelenggaraannya ia dikalahkan oleh kepentingan keamanan fisik, akibat pertikaian politik dan tuntutan ekonomi. Semboyan Bhineka Tunggal Ika dan pelaksanaan amanat UUD 1945 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa diabaikan, kalau tidak ditanggguhkan. Bahkan kedudukan kebudayaan dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga pemerintahan nasional yang utama, dikalahkan oleh kepentingan pendidikan sekolah dalam membina keterampilan dan keahlian kerja.

Di era reformasi, kedudukan kebudayaan sebagai pendam-

ping pendidikan nasional bahkan tergusur menjadi sekedar sarana pengembangan pariwisata. Semuanya itu mencerminkan betapa rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap arti pentingnya kebudayaan sebagai landasan pembangunan bangsa yang seharusnya menghormati kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan mereka. Kalau pun di masa Orde Baru ada upaya untuk menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai Pancasila melalui program P4, nampaknya lebih banyak dilakukan untuk kepentingan politik praktis daripada pembangunan kebudayaan bangsa dalam arti luas. Karena itu ada kesan terjadinya pemasangan kebudayaan-kebudayaan daerah dan sukubangsa untuk mengembangkan kebudayaan nasional demi kepentingan pengukuhan hegemoni pemerintahan pusat dan birokrasi sentralistik. Akibatnya masyarakat menjadi masa bodoh, atau berusaha untuk mengaktifkan kembali kebudayaan-kebudayaan daerah maupun sukubangsa sebagai lambang yang mencerminkan harkat dan martabat mereka sebagai warga yang berdaulat.

Sesungguhnya setiap bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia, memerlukan satu kebudayaan nasional sebagai lan-

dasar ataupun media sosial yang memperkuat persatuan. R. Gellner (1998) dalam uraiannya tentang kebangsaan (*nationalism*) sebagai prinsip politik, menyatakan arti pentingnya kebudayaan sebagai dasar ikatan sosial yang harus dibina. Arti pentingnya kebudayaan sebagai tali pengikat yang mendasar bagi suatu bangsa itu lebih kuat terasa di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk dengan aneka ragam kebudayaannya. Bangsa Indonesia yang terwujud sebagai hasil kesepakatan bersama segenap masyarakat lokal maupun suku-sukubangsa yang semula hidup mandiri dengan mengacu pada kebudayaan masing-masing, memerlukan kerangka acuan bersama untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana halnya dengan bangsa-bangsa yang berdaulat lainnya. Kenyataan sosial itu sesungguhnya disadari sepenuhnya oleh para pelopor kemerdekaan sebagaimana tercermin dalam Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Secara simbolik, kesadaran akan arti pentingnya kebudayaan sebagai sarana pemersatu itu diungkapkan dalam kesepakatan untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Secara tegas dinyatakan bah-

wa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menunjukkan keberadaan dan fungsi bahasa-bahasa lain yang hidup dalam masyarakat harus dihormati. Analog dengan keberadaan dan fungsi bahasa, keberadaan dan fungsi kebudayaan daerah dan suku-suku bangsa lainnya harus tetap dihormati. Akan tetapi kebutuhan akan kebudayaan nasional, baik sebagai landasan persatuan bangsa maupun kerangka acuan dalam pergaulan lintas lingkungan masyarakat daerah maupun sukubangsa tidak boleh diabaikan. Sebagaimana halnya dikemukakan oleh Marriott, (19..) setiap bangsa memerlukan kebudayaan nasional sebagai: Pertama, perangkat nilai budaya inti (*core value*) yang berfungsi sebagai kerangka acuan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara; Kedua, jati diri bangsa yang dapat memperkuat persatuan dan membedakan dari bangsa-bangsa lainnya; Ketiga, landasan perjuangan bangsa dalam pergaulan internasional.

Kebutuhan akan kebudayaan nasional sedemikian itu sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia yang terwujud sebagai masyarakat majemuk dengan keanekaragaman kebudayaannya. Kebudayaan nasional harus mampu menjembatani pergaulan so-

sial lintas kesukubangsaan maupun kedaerahan dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu pengembangan kebudayaan nasional Indonesia juga harus memperhatikan keanekaragaman kebudayaan yang tumbuh dan berkembang sebagai kerangka acuan bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Hal itu secara tepat diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia harus memperhatikan kebudayaan-kebudayaan yang dikembangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Akan tetapi dalam pengembangannya perlu dilakukan secara selektif, yang secara eksplisit juga dinyatakan dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945, antara lain, yaitu "Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia".

Puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah itu hendaknya tidak diartikan sebagai perwujudan (*manifestation*) dan ungkapannya (*expression*) yang dapat terus berkembang, melainkan sebagai nilai-nilai budaya inti (*core value*) yang relatif kekal dan membentuk konfigurasi budaya yang berfungsi sebagai etos budaya bangsa. Konfigurasi budaya itulah yang kita namakan Pancasila yang dapat memper-

satukan segenap bangsa dan mampu membangkitkan dinamika sosial ke arah kemajuan. Sebagai konfigurasi budaya, karena itu, setiap nilai budaya inti yang berasal dari puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah itu berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Karena itu pula nilai-nilai budaya inti itu sama kedudukannya dalam membentuk konfigurasi dan terpadu secara menyeluruh (*integrated whole*), sehingga tidak mungkin diperlakukan secara terpisah-pisah.

Akan tetapi pengertian itu seringkali tidak sesuai dengan semangat para pendiri negara, terutama yang menyangkut predikat puncak-puncak kebudayaan. Ada sementara pihak yang terperangkap pada etimologi puncak-puncak sebagai *paramount cultures* yang dapat membangkitkan kekaguman (*standard of excellent*). Karena itu almarhum dokter Murdowo, yang kebetulan juga seorang seniman, pernah mengemukakan pendapatnya bahwa puncak-puncak kebudayaan itu adalah unsur-unsur kebudayaan yang mengandung nilai *adi-luhung* seperti senitari Jawa dan Bali. Pendapat tersebut tidak salah, melainkan bukan satu-satunya tolok ukur yang harus digunakan.

Puncak-puncak kebudayaan

itu hendaknya diartikan sebagai unsur-unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dari daerah-daerah dengan ciri-ciri: Pertama, sangat luas persebarannya di seluruh tanah air (*universality*); Kedua, mempunyai relevansi nyata; Ketiga, mempunyai kekhususan; Keempat, memiliki potensi kemajuan adab.

Prinsip universalitas: Puncak-puncak kebudayaan itu seharusnya diartikan sebagai unsur-unsur yang sangat luas persebarannya dan dapat dianggap sebagai unsur-unsur kebudayaan yang menunjukkan persamaan (*cultural similarity*) dan karena itu sangat besar peluangnya untuk diterima sebagai unsur yang dapat memperkaya dan merangsang perkembangan kebudayaan nasional. Sebagai contoh adalah nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan ciri universalnya di kalangan masyarakat Indonesia di mana pun mereka berada sepanjang sejarah. Karena itu dengan mudah nilai budaya itu dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali.

Prinsip relevansi: Puncak-puncak kebudayaan itu juga harus mempunyai kegunaan praktis (*utility*) dalam kehidupan masyarakat majemuk yang memerlukan kerangka acuan maupun media sosial untuk memperlancar interaksi sosial lintas

lingkungan sosial maupun kebudayaan secara tertib. Karena itu bahasa Melayu yang bermula berfungsi sebagai bahasa pasar dengan mudah diterima sebagai bahasa persatuan dan menyisihkan bahasa Jawa yang sesungguhnya merupakan bahasa terbesar dalam kaitan jumlah pengujarnya.

Prinsip distingtif (*distinctiveness*): Puncak-puncak kebudayaan itu hendaknya juga diartikan sebagai unsur-unsur kebudayaan yang menunjukkan kekhususan ataupun yang mempunyai potensi sebagai unsur kebudayaan yang diidolakan sebagai unsur jatidiri bangsa yang membedakan dari bangsa lain. Unsur-unsur kebudayaan sedemikian itu, apabila dipupuk dan dimasyarakatkan secara intensif, akan dapat membentuk kepribadian bangsa yang diharapkan, seperti nilai-nilai budaya yang menghargai tinggi musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menegakkan demokrasi.

Prinsip kemajuan (adab): Puncak-puncak kebudayaan hendaknya juga diartikan sebagai unsur-unsur kebudayaan yang membuka peluang atau memperlancar kreativitas masyarakat untuk mengembangkan penemuan dan rekayasa pembaharuan menuju adab sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Karena itu puncak-

puncak kebudayaan itu tidak menutup kemungkinan penyerapan unsur-unsur kebudayaan asing, di samping kebudayaan-kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah, selama ia dapat memperlancar perkembangan kebudayaan nasional menuju ke peradaban.

Prinsip kesetaraan (*equality*): Amanat pasal 32 juga menekankan arti pentingnya semangat kesetaraan di samping keanekaragaman dalam pengembangan kebudayaan bangsa, sebagaimana tercermin dalam penjelasan tentang arah kemajuan yang harus ditempuh, yaitu menuju kemajuan adab, budaya dan persatuan bangsa. Peleburan masyarakat majemuk menjadi satu bangsa yang beradab tidak mungkin terlaksana tanpa pengakuan dan penghormatan kese-

taraan dalam keanekaragaman atau Bhineka Tunggal Ika.

Dengan pengertian puncak-puncak kebudayaan sedemikian itulah, kekecewaan maupun kecemburuan sosial yang ditimbulkan oleh kecenderungan subyektivitas dan dominasi pengaruh kebudayaan tertentu dalam pengembangan kebudayaan nasional dapat dihindarkan atas dasar keanekaragaman dan kesetaraan yang seringkali dilupakan pemerintah yang berkuasa maupun masyarakat umum. Bahkan dengan pengertian tersebut, semangat masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dalam memperbesar sumbangan unsur kebudayaan masing-masing dalam pengembangan kebudayaan nasional menuju peradaban dapat ditingkatkan secara lebih kuat.